

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya mengenai analisis laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang adalah salah satu lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan serta aset daerah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung pemangunan Kota Padang.
2. Dilihat dari anggaran dan realisasi belanja maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dikatakan baik dari tahun 2021 – 2023 dikarenakan tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan. Relisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.847.962.101.366 atau mencapai 12,41 persen dari alokasi anggaran Rp. 2.077.315.043.692. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.745.636.381.365 atau mencapai 6,80% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.864.371.562.430. Dan pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp. 1.821.762.342.856 atau mencapai 47,38% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.958.724.814.334. dari ketiga tahun

tersebut bisa dilihat bahwa persentase realisasi berada dibawah anggaran atau <100% (kecil dari 100%) yang artinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang telah ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

3. Pertumbuhan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang berdasarkan analisis pertumbuhan belanj dari tahun 2021 – 2023 terus berfluktuasi. Dari analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2021/2022 dan tahun anggaran 2022/2023 menunjukkan belanja cukup efisien. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada tahun 2017/2018 adalah sebesar 5,86% dan 2018/2019 sebesar 4,36%.
4. Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja yang digunakan pada tahun 2021 – 2023, dilakukan analisis varians belanja. Hasil analisis menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang kurang efisien dalam menggunakan anggaran belanja, dengan tingkat efisiensi lebih dari 90%. Rasio efisiensi belanj mengidentifikasi bahwa penggunaan anggaran belum memenuhi syarat efisiensi, yaitu menggunakan dana semisal mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD belum berhasil mengelola anggaran secara optimal dalam periode tersebut.
5. Berdasarkan perhitungan analisis keserasian belanja, terlihat bahwa Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang lebih cenderung memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja operasi daripada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Padang lebih fokus pada pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan operasional dalam jalannya pemerintahan daripada pengotimalan pemangunan daerah yang masih membutuhkan peningkatan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya

daerah mungkin belum mendapat perhatian yang optimal dalam alokasi anggaran BPKAD Kota Padang. Rata – rata belanja operasi pada tahun 2021 – 2023 adalah 95,86% sedangkan rata – rata belanja operasi tahun 2021 – 2023 adalah sebesar 4,07%. Hal ini tidaklah baik, karena pemerintah seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya atau setidaknya seimbang diantara keduanya yaitu belanja operasi dan belanja modal minimal harus sebanding.

## 5.2 Saran

Dari penyusunan tugas akhir ini, saya ingin memberikan beberapa saran. Pertama, pertumbuhan belanja pada periode tersebut dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan anggaran pada periode selanjutnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang perlu meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, baik itu APBD maupun APBN, dengan fokus pada efisiensi, produktifitas, dan efektivitas.

Kedua, penting untuk lebih mengoptimalkan alokasi anggaran belanja modal sambil meminimalkan belanja operasional. Dengan cara ini, diharapkan kinerja antara belanja operasional dengan belanja modal dapat seimbang, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah secara holistik. Dengan kinerjanya yang baik, BPKAD Kota Padang dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat dari pembangunan daerah secara keseluruhan.